



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Jerongko, 15 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sekokok, 17 Desember 2003, Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 16 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **05 April 2019** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Perjaka**, dan Pemohon II berstatus **Gadis**. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **XXX**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **XXX** dan **XXX** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat yang di bayar tunai.

Hlm. 1 dari 4

Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXX, umur 4 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. **Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 400.7.3.6/154/XI/2024, tanggal 03 Desember 2024.**
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal **05 April 2019** di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar.

Hlm. 2 dari 4
Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 RBg permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor: **687/Pdt.P/2024/PA.Sub**, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini

Hlm. 3 dari 4
Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Erpan, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H. dan Hafidzul Aetam, S.Hi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lalu Ahmad Anshari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H.

Erpan, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Hafidzul Aetam, S.Hi

Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	...,00
2	Biaya Proses	: Rp.	0,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4	PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
5	Materai	: Rp.	0,00
6	Biaya redaksi	: Rp.	0,00
	Jumlah	Rp.	0,00

(nol rupiah)

Hlm. 4 dari 4
Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Sub